

### Pemkab Sidoarjo Berlakukan Pembebasan Denda Pajak

Mulai 4 Mei hingga 29 Oktober 2026

**Sidoarjo, Memorandum**  
Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan denda pajak daerah mulai 4 Mei hingga 29 Oktober 2026.



Flyer pembebasan denda pajak daerah di Sidoarjo.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meringankan beban masyarakat. Program ini mencakup pembebasan denda untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga masa pajak tahun 2025.

Selain itu, pembebasan juga berlaku untuk Pajak Daerah Lain seperti PBBT (Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesehatan dan Hiburan), Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah hingga masa pajak tahun 2025 serta periode Januari hingga Maret 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat sekaligus upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Program tersebut dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani dalam serta berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang tersedia, mulai dari perbankan, gerai ritel modern, hingga platform digital seperti QRIS dan virtual

account. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi pajak daerah Sidoarjo, tautan digital: bit.ly/PPDKab-Sidoarjo maupun pemindian QR code yang telah disediakan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya program ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat dan masyarakat ditimbal segera memanfaatkan periode pembebasan denda tersebut sebelum batas waktu yang telah ditentukan. (fok/fer)

### Belajar Strategi Tingkatkan PAD Bupati Karangasem Kunjungi Sidoarjo

**Sidoarjo - HARIAN BANGSA**  
Bupati Karangasem Bali, I Gusti Putu Purwata melakukan kunjungan ke Kabupaten Sidoarjo, Jumat (8/5). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi di dampingi beberapa kepala OPD, di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar strategi Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Menurut Bupati Karangasem, I Gusti Putu Purwata, Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak kemajuan, khususnya dalam komersialisasi fiskal, diantaranya peningkatan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi pemerintahan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi daerah saat ini salah satunya terkait regulasi pendapatan daerah dan kebijakan pengurangan (Pangresor) ke Daerah (TKD).

"Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Kami perlu cari strategi dan inovasi" cetus Bupati Karangasem.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan, upaya peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan kawasan industri yang ada, namun juga didukung penguatan sistem digital dan penguasaan berbasis teknologi.

"Kami memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar," beber Subandi.

Ini menambahkan, Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat kolaborasi seluruh OPD dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, teknologi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. (sta/ns)

Bupati Sidoarjo Subandi menerima kunjungan Bupati Karangasem Bali, Jumat (8/5). foto diskominfo



Kaporesta Sidoarjo Komposi Christian Tobing bersama mahasiswa saat ngopi bareng di Kedai Kopi Limasan Kecamatan Candi.

### Kaporesta Sidoarjo Ngopi Bareng Mahasiswa

#### Bahas Gangster hingga Pilkades

**Sidoarjo, Memorandum**  
Kaporesta Sidoarjo Komposi Christian Tobing bersama mahasiswa ngopi bareng di Kedai Kopi Limasan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kegiatan tersebut, Kaporesta Sidoarjo didampingi Kasidam Kompol M. Hedi, Hadir pula sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa, di antaranya Satya Buana Putra dari IMI Sidoarjo, Almasi Tira dari HMI Sidoarjo, Sultan Saladin Barubara selaku Ketua Aliansi BEM Delta Sidoarjo, Antonius Dhuha Ketua GANI Sidoarjo, Agus Panata dari BEM UNESA, serta M. Alifien Maulana dari PMII Sidoarjo.

Berbagai isu dibahas dalam forum santai tersebut, mulai pendidikan, kenakalan remaja, pengurangan anggaran, langkah pencegahan terhadap kenakalan remaja, khususnya keterlibatan gangster dan bahaya narkoba di kalangan generasi muda.

"Perlu adanya langkah preventif yang lebih masif agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba," ujarjarnya.

Sementara itu, Sultan Saladin Barubara dari Aliansi BEM Delta Sidoarjo berharap mahasiswa dapat dibekali dengan ilmu yang dapat diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, mahasiswa juga menyatakan keinginan untuk mengoptimalkan pengalaman lapangan dan penugasan belajar di Kabupaten Sidoarjo.

Kaporesta Sidoarjo mengatakan, forum diskusi bersama mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Sidoarjo.

"Melalui forum diskusi seperti ini, kami berharap terbangun komunikasi yang baik antara kepolisian dengan mahasiswa maupun masyarakat, sehingga bersama-sama dapat mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujarnya.

Terkait pelaksanaan Pilkades serentak 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Kaporesta Sidoarjo mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertarikan informasi bahwa maupun isu yang dapat memecah belah masyarakat.

Ini mengajuk seluruh pihak bersama-sama menciptakan suasana Pilkades yang aman, damai, tertib dan sejahtera demi terwujudnya kondusifitas wilayah Kabupaten Sidoarjo. (fok/fer)



FASILITAS BARU: Gubernur Jatin Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding (kanan) meninjau kegiatan bagian dari Instalasi Karantina Terpadu di Pajago Agro, Jumat (8/5).

### Karantina Terpadu Layani 911.360 TEUs Kontainer Per Tahun

**SIDOARJO - Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur di Fermano Pajago Agro resmi beroperasi pekan lalu. Fasilitas yang berdiri di lahan seluas lima hektare itu merupakan instalasi terpadu pertama di Indonesia.**

Tidak hanya pelayanan administrasi, ada pula laboratorium dan gudang yang menunjang kegiatan kekarantina. Keberadaan fasilitas instalasi diharapkan memudahkan dalam proses perdagangan antara negara-negara di kawasan ini.

"Dengan adanya berbagai terintegrasi ini, proses logistik dan karantina tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu sistem yang modern dan efektif," katanya.

Menurutnya, volume pergerakan komoditas di Jawa Timur terus meningkat hingga lebih dari 350 ribu frekuensi media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan setiap tahun. Dari angka itu, potensi arus kontainer yang masuk Instalasi Karantina Terpadu diperkirakan bisa mencapai 911.360 TEUs per tahun. Rinciannya 811.728 TEUs Impor dan 99.632 TEUs ekspor.

"Keberadaan kawasan karantina terpadu tersebut diharapkan mampu meningkatkan biaya logistik sekaligus distribusi barang menjadi lebih cepat dan efisien," pungkas Khofifah. (eza/hen)

### 230 CAKADES SIDOARJO SERENTAK IKUTI PEMBEKALAN, BUPATI SUBANDI TEGASKAN PILKADES DAMAI

**Sidoarjo, Pojok Kiri-**  
Sebanyak 230 calon kepala desa (Cakades) di Kabupaten Sidoarjo mengikuti pembekalan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Kegiatan itu digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026).

Di hadapan para cakades, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo harus berjalan damai, aman, dan tidak menimbulkan keagaduan di tengah masyarakat.

"Komitmen kita Pilkades damai. Pemilihan kepala desa tanggal 24 Mei 2026 nanti jangan sampai menjadi ke-



Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pelaksanaan Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo harus berjalan damai, aman, dan tidak menimbulkan keagaduan di tengah masyarakat.

rawan konflik politik.

"Kita sudah mapping daerah-daerah yang rawan politik hingga tingkat," katanya.

Selain menekankan pentingnya stabilitas politik, Subandi juga mengingatkan para calon kepala desa agar tidak terbebani biaya politik yang terlalu besar. Ia menilai tingginya biaya politik dapat berujung korupsi sel-sel edul menjabat.

"Kalau kita mencairkan Rp300 juta atau Rp500 juta tentu tidak nutuk. Kalau biaya politik itu mau di korupsi karena gaji kepala desa ini Rp 5,5 juta," katanya.

Sementara itu, Kepala Diptim Kabupaten Sidoarjo dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Probo Agus Sunarno menyampaikan bahwa Pilkades serentak 2026 akan dilaksanakan di 80 desa yang tersebar di 17 kecamatan.

"Terdapat 230 calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades tahun 2026," ujarnya.

Ia berharap seluruh tahapan kampanye dapat berlangsung santun, edukatif, dan bermartabat dengan mengedepankan visi misi pembangunan desa yang realistis.

"Kami berharap kampanye berlangsung santun, edukatif, dan bermartabat. Visi misi harus mengacu pada potensi desa serta kebutuhan masyarakat desa," tuturnya. (Khol/D)

### Rayakan Hari Kartini KGPS Luncurkan Buku 'Perempuan Pencerah Hati'

**Sidoarjo, HARIAN BANGSA**  
Komunitas Guru Perempuan Sidoarjo (KGPS) meluncurkan buku antologi puisi ke-12 bertajuk 'Perempuan Pencerah Hati' sekaligus menggelar Talkshow bertema 'Gengrah Perempuan di Era Digital', Sabtu (9/5).

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Perencanaan Pembangunan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPAKKB) Sidoarjo ini dibuka dengan sambutan tari tradisional yang merukau para tamu undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DPAKKB Sidoarjo Heni Kristiani, Ketua Persewaan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo Mustain, Wakil Ketua Persewaan PGRI Jawa Timur Siti Chomsyah, anggota KGPS serta anggota PWS Sidoarjo.



Narasumber dan penulis KGPS menunjukkan Buku Antologi Puisi 'Perempuan Pencerah Hati', Sabtu (9/5). foto istimedia

"Perempuan adalah tiang peradaban. Dari tutur katanya mengalir nilai, dari tangannya terukir arah, dari langkahnya terdapat harapan," ungkap Subartatik, ia berharap kepada seluruh pendidik, khususnya guru Perempuan, untuk tidak berhenti berkarya meski distakel dengan aktivitas mengajar di kelas.

Kejutan DPAKKB Sidoarjo Heni Kristiani menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para penulis anggota KGPS. Menurutnya, di era digital ini, perempuan memiliki

peluang yang sangat besar untuk berkontribusi melalui tulisan dan karya kreatif lainnya.

"Di era digitalisasi ini, semua pihak diharapkan bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan. Harapannya, perempuan Sidoarjo terus berkarya dan berprestasi untuk membangun Sidoarjo yang lebih baik," harapnya.

Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, berpesan apresiasi setinggi-tingginya atas produk tulisan 35 anggota KGPS yang berwujud edisi ke-12 merupakan capaian luar biasa yang patut dicatat.

"Hari ini kita menjadi saksi atas sebuah penciptaan sastra yang membanggakan, yakni peluncuran antologi puisi 'Perempuan Pencerah Hati' karya para guru perempuan di Kabupaten Sidoarjo," ujar Mustain.

Mustain menambahkan, bahwa menulis adalah bentuk perjuangan. Ketika para guru yang sehat-hari menandatangani dengan menghidupkan pikiran dalam bentuk puisi, itu bukti semangat. Kartini benar-benar hidup. (sta/ns)

### Cari Simpati Massa, Cakades Pasang Foto Anggota Dewan

ADA beragam strategi yang dilakukan cakades untuk memenangkan kontes. Sejumlah cakades lebih memilih untuk memasang foto anggota dewan untuk menarik simpati masyarakat. Upaya itu menjadi simbol keterkaitan antara dinamika politik desa dan daerah.

Dari pantauan, sejumlah cakades turut menampilkan foto anggota dewan dengan ukuran cukup besar.

Seperti di Desa Suko yang memasang foto anggota DPRD Sidoarjo dari PKB dan PDIP dalam balho kampanyenya.

Kejutan DPAKKB Sidoarjo Probo Agus mengatakan bahwa pemasangan foto anggota DPRD di balho cakades tidak otomatis melanggar regulasi Pilkades. "Kalau hanya pemasangan foto tidak melanggar aturan," kata Probo.

Meski begitu, dia khawatir adanya pilkades yang dipenuhi simbol-simbol politik berlebihan. Itu menunjukkan adanya campur tangan elite politik dalam proses demokrasi desa yang berpotensi membuat kesusut. Soal balho yang ada foto anggota DPRD, Probo mengaku belum menerima laporan resmi keberatan dari masyarakat. Pemkab akan berkoordinasi dengan DPRD jika ada aduan terkait persoalan tersebut. (fal/hen)

### Dukung Wisata Pesisir, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unesa Ajari Warga Membuat Video Promosi



PRAKTIK LANGSUNG: Mahasiswa Unesa Laila Nescha (dua dari kiri) dan Faridha Husri'n (dua dari kanan) mengajari anggota Karang Taruna PBI Ayu Nur Fadiah (kanan) dan Gabby Oveline (kiri) membuat video promosi di Desa Tambak Cemandi, Sedati, kemarin (10/5).

**SIDOARJO - Sektor pariwisata di pesisir utara-timur Sidoarjo masih belum digarap secara maksimal. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan, delapan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar pelatihan literasi digital dan pembuatan konten promosi wisata di Desa Tambak Cemandi. Sedati, kemarin (10/5).**

Kegiatan tersebut memfasilitasi pemuda Karang Taruna dan perangkat desa. Ketua panitia Hoesa Alessandro Hill Mori mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara mahasiswa Unesa dan Karang Taruna. Kegiatan berlangsung selama dua hari dan melibatkan 15 perangkat desa yang mengikuti pelatihan. Selain materi teoritis, peserta juga diajarkan praktik langsung membuat video promosi wisata.

Desa Tambak Cemandi dipilih karena memiliki potensi wisata yang sangat tinggi dan memiliki lokasi yang strategis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata yang ada di Desa Tambak Cemandi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam membuat konten promosi wisata yang menarik dan informatif.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pelatihan pembuatan konten foto dan video promosi wisata menggunakan telepon genggam. Mereka mempromosikan kondisi sungai, mangrove, dan suasana pantai Desa Tambak Cemandi. Mereka juga mendapatkan informasi mengenai potensi wisata yang ada di Desa Tambak Cemandi. "Kami berharap promosi wisata desa bisa lebih berkembang dan semakin banyak masyarakat luar yang mengenal Desa Tambak Cemandi," ujarnya. (fal/hen)

## Pemkab Sidoarjo Berlakukan Pembebasan Denda Pajak

Mulai 4 Mei hingga 29 Oktober 2026

### Sidoarjo, Memorandum

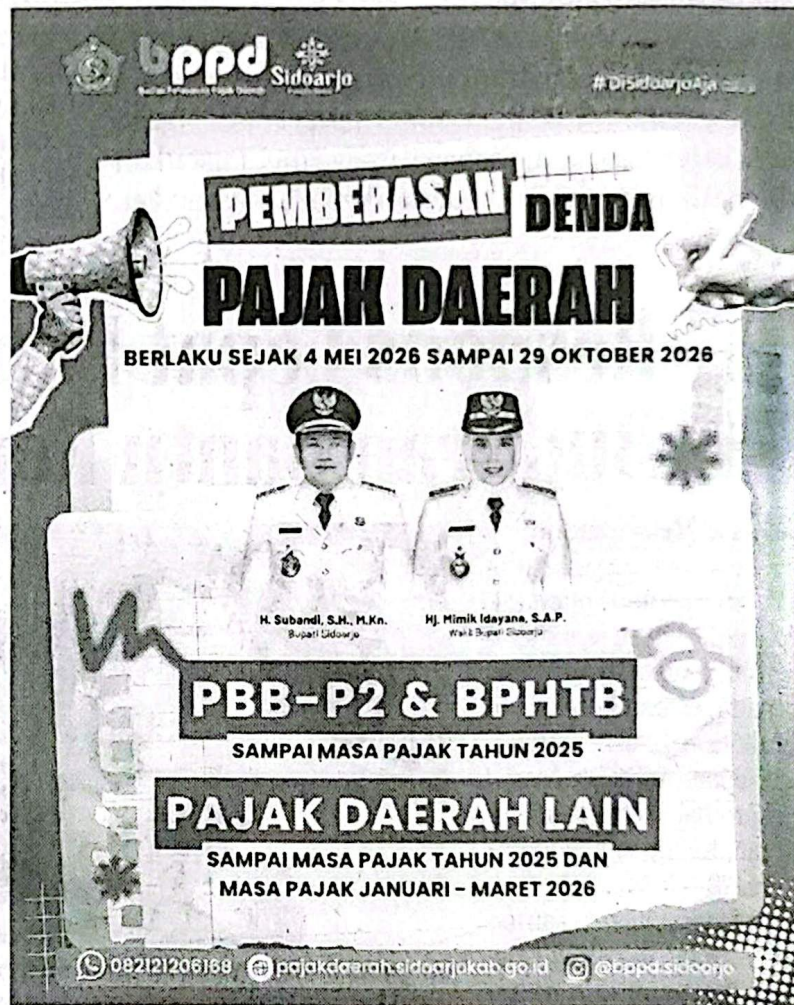
Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan denda pajak daerah mulai 4 Mei hingga 29 Oktober 2026.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meringankan beban masyarakat. Program ini mencakup pembebasan denda untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga masa pajak tahun 2025.

Selain itu, pembebasan juga berlaku untuk Pajak Daerah Lain seperti PBJT (Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan); Pajak Reklame; dan Pajak Air Tanah hingga masa pajak tahun 2025 serta periode Januari hingga Maret 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat sekaligus upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Program tersebut dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajibannya tanpa terbebani denda serta berharap masyarakat memanfaatkan momentum tersebut sebaik-baiknya.

Bupati menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan



Flyer pembebasan denda pajak daerah di Sidoarjo.

daerah. Pajak merupakan kontribusi bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya serta kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan.

Untuk memudahkan pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang tersedia, mulai dari perbankan, gerai ritel modern, hingga platform digital seperti QRIS dan virtual

account. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi pajak daerah Sidoarjo, tautan digital: [bit.ly/BPPDKab-Sidoarjo](https://bit.ly/BPPDKab-Sidoarjo) maupun pemindaian QR code yang telah disediakan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya program ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat dan masyarakat diimbau segera memanfaatkan periode pembebasan denda tersebut sebelum batas waktu yang telah ditentukan. (jok/fer)



Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing bersama mahasiswa saat ngopi bareng di Kedai Kopi Limasan Kecamatan Candi.

# Kapolresta Sidoarjo Ngopi Bareng Mahasiswa

## Bahas Gangster hingga Pilkadaes

### Sidoarjo, Memorandum

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menggelar ngopi bareng bersama perwakilan mahasiswa di Kedai Kopi Limasan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Sidoarjo didampingi Kasatintekam Kopol M Arobi. Hadir pula sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa, di antaranya Satria Buana Putra dari IMM Sidoarjo, Ahmad Tirta dari HMI Sidoarjo, Sultan Saladin Batubara selaku Ketua Aliansi BEM Delta Sidoarjo, Antonius Dhuha Ketua GMNI Sidoarjo, Bagus Putra dari BEM UMSIDA, serta M Alfien Maulana dari PMII Sidoarjo.

Berbagai isu dibahas dalam forum santai tersebut, mulai pendidikan, kenakalan remaja, gangster, pungutan liar, ketenagakerjaan hingga gangguan kamtibmas lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Satria Buana Putra dari IMM Sidoarjo menyoroti pentingnya langkah pencegahan terhadap kenakalan remaja, khususnya keterlibatan gangster dan bahaya narkoba di kalangan generasi muda.

"Perlu adanya langkah preventif yang lebih masif agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Sementara itu, Sultan Sala-

din Batubara dari Aliansi BEM Delta Sidoarjo berharap mahasiswa dapat dilibatkan dalam upaya penanganan pungutan liar, termasuk di sektor pendidikan.

Selain itu, mahasiswa juga menyatakan kesiapan mendukung optimalisasi pengelolaan sampah dan penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo mengatakan, forum diskusi bersama mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

"Melalui forum diskusi seperti ini, kami berharap ter-

bangun komunikasi yang baik antara kepolisian dengan mahasiswa maupun masyarakat, sehingga bersama-sama dapat mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujarnya.

Terkait pelaksanaan Pilkadaes serentak dalam waktu dekat, Kapolresta Sidoarjo mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi informasi hoaks maupun isu yang dapat memecah belah masyarakat.

Ia mengajak seluruh pihak bersama-sama menciptakan suasana Pilkadaes yang aman, damai, tertib dan sejuk demi terwujudnya kondusifitas wilayah Kabupaten Sidoarjo. (jok/fer)

## 230 CAKADES SIDOARJO SERENTAK IKUTI PEMBEKALAN, BUPATI SUBANDI TEGASKAN PILKADES DAMAI

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Sebanyak 230 calon kepala desa (Cakades) di Kabupaten Sidoarjo mengikuti acara pembekalan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Kegiatan itu digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026).

Di hadapan para cakades, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo harus berjalan damai, aman, dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Komitmen kita Pilkades damai. Pemilihan kepala desa tanggal 24 Mei 2026 nanti jangan sampai menjadi keg-



aduhan. Paslon dengan paslon harus bisa menjaga stabilitas politik, termasuk tim suksesnya agar tidak ada kegaduhan di desa," ujar Subandi.

Menurutnya, Pilkades harus menjadi ajang demokrasi

yang sehat dan tidak memecah belah masyarakat desa. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama jajaran Forkopimda telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang dinilai

rawan konflik politik.

"Kita sudah mapping daerah-daerah yang rawan politiknya tinggi," katanya.

Selain menekankan pentingnya stabilitas politik, Subandi juga mengingatkan para calon kepala desa agar tidak terbebani biaya politik yang terlalu besar. Ia menilai tingginya biaya politik dapat memicu praktik korupsi setelah menjabat.

"Kalau habisnya Rp300 juta atau Rp500 juta tentu tidak nutut. Kalau biaya politik tinggi, mau nggak mau ada korupsi karena gaji kepala desa ini Rp 5,5 juta," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo,

Probo Agus Sunarno menyampaikan bahwa Pilkades serentak 2026 akan dilaksanakan di 80 desa yang tersebar di 17 kecamatan.

"Terdapat 230 calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades tahun 2026," jelasnya.

Ia berharap seluruh tahapan kampanye dapat berlangsung santun, edukatif, dan bermartabat dengan mengedepankan visi misi pembangunan desa yang realistis.

"Kami berharap kampanye berlangsung santun, edukatif, dan bermartabat. Visi misi harus mengacu pada potensi desa serta kebutuhan masyarakat desa," tuturnya. (Khol/Dv)

# Diduga Dapat Proyek PL Peningkatan Saluran Irigasi Grogol Ada Unsur Pelizin Lemot Zonk Belum Dikerjakan

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Seperti diexpose di harian ini sebelumnya Proyek Peningkatan irigasi Grogol di (Sidak) Inspeksi Mendadak oleh wartawan,dalam bahasa jurnalis investigasi lokasi ternyata masih zonk, Keberadaan proyek Penunjukan Langsung (PL) itu berada dilokasi irigasi Desa Grogol Tulangan yang tertera pada aplikasi Ipse Sidoarjo 2026 dengan nilai per item proyek Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) an yang dimenangkan oleh Cv Mitra Karya beralamatkan Keper Krembung lemot belum dikerjakan.

Informasi yang didapatkan dari BD orang yang pernah dipakai Dinas untuk mengepul proyek PL, kontraktor ST adalah rajanya

proyek PL dan ia berani kasih pelizin lebih pada oknum dinas, ucap BD pada wartawan, Minggu,10/5/26.

Perihal itu sudah bukan rahasia umum lagi kalau ST adalah rajanya proyek PL, dia adalah spesialis proyek PL, katanya.

Sedangkan Kepala desa Grogol saat dikonfirmasi wartawan di kantornya tentang keberadaan proyek PL di Peningkatan Irigasi justru tidak mengetahuinya, hanya mengatakan ada orang PU sama kontraktor masih tinjau lokasi, katanya.

Sedangkan Kabid Jembatan Jalan Sidoarjo, Prayit saat dikonfirmasi wartawan,Rabu 6/5/26 ia katakan mulai sekarang proyek PL Peningkatan Irigasi Grogol masih uitset, katanya.

Sayang ketika hasil investigasi wartawan di lokasi tidak ada kegiatan proyek dengan menunjukkan foto lokasinya, ia pun terdiam seribu bahasa tanpa jawaban.Sementara Direktur CV Mitra Karya, ST saat dikonfirmasi terkait proyek ini, via WhatsApp, Rabu, 5/5/26 ia mengakuinya itu CV saya yang kerjakan.

Investigasi keberadaan CV Mitra Karya itu rupanya sering mendapatkan proyek PL dari Dinas PUBMSDA Sidoarjo ucap penggiat pemerhati proyek, H Abdul. Sedangkan Solik ketua LSM AMPK menduga proyek itu kalau sampai sekarang belum dikerjakan bisa bisa fiktif, kalau tidak kita sorot terus, ucapnya. (Khol/bersambung)

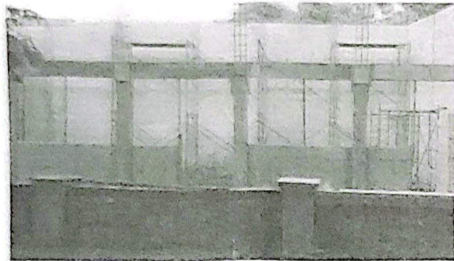
Revisi	Perihal	Halaman	Penyedia	Penyedia Berkontrak
Nama Non Tender	Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi Di Grogol Kiri Tulangan			
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi			
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kab. Sidoarjo			
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air			
Pagu	Rp 251.000.000,00			
KPS	Rp 250.178.312,00			
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
CV MITRA KARYA	KEPER RT 08 RW 04 KEPER KREMBUNG Sidoarjo Kab. Jawa Timur	0714040000000	Rp. 250.178.312,00	Rp. 250.178.312,00
				Hasil Negosiasi Rp. 250.120.375,00



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Untuk lebih ada kegiatan proyek Peningkatan Insansi PL.



Fungsional	Perantara	Hub/Posisi	Demang	Wenang/kecamatan
Nama Nis Tender	Dibangun Ruang Kelurahan Kelurahan Taman			
Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Konstruksi			
K/L/PP/Instansi Lainya	Kab. Sidoarjo			
Satuan Kerja	Kelurahan Taman			
Page	Rp. 130.000.000,00			
NPS	Rp. 345.938.800,00			
Nama Pemegang	Alamat	NOMOR		
EMERGI AIRCOND	Surabaya, Citra Armanda Blok D/2312 Desa Sembakli Km. Candi Kab	08123456789		
INDONESIA	Sidoarjo Prov. Jawa Timur	Sidoarjo Kab. Jember Timur		

## Diduga Ngawur Proyek Pembangunan Kelurahan Taman Tidak Sesuai Bestek

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Proyek pembangunan ruangan Kelurahan Taman dengan nilai 377 juta an yang bersumber dari dana APBD Sidoarjo tahun 2026 dinilai keterbukaan informasi proyek APBD Sidoarjo, H Abdul.Pasalnya menurut dia proyek itu tidak sesuai kaidah keterbukaan informasi publik,tidak tertera papan nama kegiatan proyek yang diamanatkan oleh Undang-undang informasi keterbu-

kaan publik nomor 14 tahun 2008 dimana,Undang-undang itu berbunyi setiap kegiatan proyek yang dibiayai oleh dana negara/rakyat harus dan wajib menempel papan kegiatan proyek,karena hal itu adalah unsur keterbukaan informasi publik dimana setiap orang bisa mengontrol kegiatan proyek agar proyek itu bisa sesuai dengan Bestek yang ada,kritiknya.

Dia juga menilai dugaan material bangunan

baik, besi, semen serta pasir tidak sesuai bestek yang ada. Bisa kita lihat itu besi banci yang dipakai serta pasir bukan dari Lumajang dan adukan semen hanya menggunakan manual tidak ada mesin molen, begitu pula campuran adukan luluh diduga tidak sesuai Bestek yang ada unsur semennya kurang sehingga mengakibatkan kurang kohonya hasil pembangunan yang mengakibatkan pembangunan rawan roboh, ucap

H. Abdul pada wartawan.

Sementara investigasi wartawan di lokasi menunjukkan tidak profesional kerja CV Sinergi Aircond Indonesia yang beralamatkan di Perumahan Citra Armanda Block D Sumokali Candi- Sidoarjo yang dikerjakan oleh kontraktor Ari Supadi. Sedangkan saat dikonfirmasi oleh wartawan Dirut Ari terkait proyek pembangunan ruangan Kelurahan Taman yang dia

kerjakan, ia menjawab, besok Senin, 11/5/26 ia akan beri kabarnya jawabannya pada wartawan via WhatsApp. Sementara Yunia Kabid Taba P2 CKTR Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Minggu 10/5/26 apakah proyek pembangunan Kelurahan Taman itu Bidanganya, ia jawab maaf saya sudah pindah tugas, tanya pada pengganti saya, Pak Herwindo, jawabnya. (Khol/ Bersambung)

## POJOK KIRI



PRAKTIK LANGSUNG: Mahasiswa Unesa Laila Nasicha (dua dari kiri) dan Faradilla Huri'in (dua dari kanan) mengajari anggota Karang taruna Fitri Ayu Nur Fadilah (kanan) dan Gabby Ovalyne (kiri) membuat video promosi di Desa Tambak Cemandi, Sedati, kemarin (10/5).

## Dukung Wisata Pesisir, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unesa Ajari Warga Membuat Video Promosi

SIDOARJO - Sektor pariwisata di pesisir utara-timur Sidoarjo masih belum digarap secara maksimal. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan, delapan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar pelatihan literasi digital dan pembuatan konten promosi wisata di Desa Tambak Cemandi, Sedati, kemarin (10/5). Kegiatan tersebut menyasar pemuda Karang taruna dan perangkat desa. Ketua panitia Hosea Alessandro Bili Mori mengatakan

bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi mata kuliah rekayasa sosial. Sebanyak 10 anggota Karang taruna dan 15 perangkat desa mengikuti pelatihan. Selain materi teori, mereka juga diajak praktik langsung membuat video promosi wisata. Desa Tambak Cemandi dipilih karena memiliki potensi wisata susur sungai dan wisata kuliner Kalitengung. Namun, promosi masih belum optimal. "Potensi wisatanya bagus. Namun perlu diperkuat dari sisi branding," katanya. Dalam kegiatan itu, peserta

mendapatkan pelatihan pembuatan konten foto dan video promosi wisata menggunakan telepon genggam. Mereka merekam kondisi sungai, mangrove, dan suasana pesisir. Perangkat Desa Tambak Cemandi Badrus mengatakan, pembuatan konten promosi wisata memang dibutuhkan untuk mengenalkan potensi wisata desa kepada masyarakat. "Kami berharap promosi wisata desa bisa lebih berkembang dan semakin banyak masyarakat luar yang mengenal Tambak Cemandi," ujarnya. (ful/hen)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



HUMAS BALAI KARANTINA

**FASILITAS BARU:** Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding (kanan) mengecek bagian dalam Instalasi Karantina Terpadu di Puspa Agro, Jumat (8/5).

## Karantina Terpadu Layani 911.360 TEUs Kontainer Per Tahun

**SIDOARJO** - Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur di Jemundo Puspa Agro resmi beroperasi pekan lalu. Fasilitas yang berdiri di lahan seluas lima hektare itu merupakan instalasi terpadu pertama di Indonesia.

Tidak hanya pelayanan administrasi. Ada pula laboratorium dan gudang yang menunjang kegiatan kekarantinaan. Keberadaan fasilitas instalasi diharapkan memudahkan dalam proses perdagangan antarnegara.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur Sokhib mengungkapkan bahwa proses pencanangan Instalasi Karantina Terpadu ini sudah dua tahun lalu. Na-

mun, fasilitas baru mulai dioperasikan 30 Maret. "Sekarang sudah dimanfaatkan untuk melayani masyarakat," katanya.

### Pangkas Dwelling Time

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penempatan kawasan terpadu di Sidoarjo sudah tepat. Menurutnya Sidoarjo merupakan kawasan ideal yang terhubung dengan pelabuhan, bandara, jalan tol, dan kawasan industri. "Dengan adanya gerbang terintegrasi ini, proses logistik dan karantina tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu sistem yang mo-

dern dan efektif," katanya.

Menurutnya, volume pergerakan komoditas di Jawa Timur terus meningkat hingga lebih dari 350 ribu frekuensi media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan setiap tahun. Dari angka itu, potensi arus kontainer yang masuk Instalasi Karantina Terpadu diperkirakan bisa mencapai 911.360 TEUs per tahun. Rinciannya 811.728 TEUs impor dan 99.632 TEUs ekspor.

"Keberadaan kawasan karantina terpadu tersebut diharapkan mampu memangkas dwelling time sekaligus menekan biaya logistik sehingga distribusi barang menjadi lebih cepat dan efisien," pungkask Khofifah. (eza/hen)

# Jawa Pos

# Cari Simpati Massa, Cakades Pasang Foto Anggota Dewan

ADA beragam strategi yang dilakukan cakades untuk memenangkan kontestasi. Sejumlah cakades lebih memilih untuk memasang foto anggota dewan untuk menarik simpati masyarakat. Upaya itu menjadi simbol keterkaitan antara dinamika politik desa dan daerah.

Dari pantauan, sejumlah baliho cakades turut menampilkan foto anggota dewan dengan ukuran cukup besar.

Seperti di Desa Suko yang memasang foto anggota DPRD Sidoarjo dari PKB dan PDIP dalam baliho kampanyenya.

Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus mengatakan bahwa pemasangan foto anggota DPRD di baliho cakades tidak otomatis melanggar regulasi Pilkades. "Kalau hanya pemasangan foto tidak melanggar aturan," kata Probo.

Meski begitu, dia khawatir

adanya pilkades yang dipenuhi simbol-simbol politik berlebihan. Itu menunjukkan adanya campur tangan elite politik dalam proses demokrasi desa yang berpotensi membuat kisruh.

Soal baliho yang ada foto anggota DPRD, Probo mengaku belum menerima laporan resmi keberatan dari masyarakat. Pemkab akan berkoordinasi dengan DPRD jika ada aduan terkait persoalan tersebut. (ful/hen)

**Jawa Pos**

## Belajar Strategi Tingkatkan PAD Bupati Karangasem Kunjungi Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Bupati Karangasem Bali, I Gusti Putu Parwata melakukan kunjungan ke Kabupaten Sidoarjo, Jumat (8/5). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi didampingi beberapa kepala OPD, di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar strategi Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Menurut Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak kemajuan.

Khususnya dalam kemandirian fiscal, diantaranya pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi pemerintahan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi daerah saat ini salah satunya terkait regulasi pendapatan daerah dan kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Kami perlu cari strategi dan inovasi” cetus Bupati Karangasem.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan, upaya peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan kawasan industri yang ada, namun juga didukung penguatan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.

“Kami memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” beber Subandi.

Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat kolaborasi seluruh OPD dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, teknologi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. (sta/ns)



Bupati Sidoarjo Subandi menerima kunjungan Bupati Karangasem Bali, Jumat (8/5). foto diskominfo

# KGPS Luncurkan Buku 'Perempuan Pencerah Hati'

Sidoarjo, HARIAN BANGSA  
Komunitas Guru Penulis Sidoarjo  
(KGPS) merayakan Hari Kartini 2026  
dengan meluncurkan buku antologi  
puisi ke-15 bertajuk "Perempuan  
Pencerah Hati" sekaligus menggelar  
Talkshow bertema "Kiprah  
Perempuan di Era Digital", Sabtu (9/5).

**A** cara yang berlangsung di  
Aula Kencana Kantor Dinas  
Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Keluarga Ber-  
encana (DP3AKB) Sidoarjo ini dibuka  
dengan suguhan tarian tradisional  
yang memukau para tamu undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut,  
Kepala DP3AKB Sidoarjo Heni Kris-  
tiani, Ketua Persatuan Wartawan  
Indonesia (PWI) Sidoarjo Mustain,  
Wakil Ketua Perempuan PGRI Jawa  
Timur Siti Chomsiyah, anggota KGPS  
serta anggota PWI Sidoarjo.

Sekretaris KGPS Suhartatik, menga-  
takan sangat bersyukur atas dukun-  
gan penuh dari DP3AKB dan PWI Si-  
doarjo. Ia menegaskan, buku antologi  
ke-15 ini adalah bentuk penegasan



Narasumber dan penulis KGPS menunjukkan Buku Antologi Puisi 'Perempuan Pencerah Hati', Sabtu (9/5). foto istimewa

peran guru perempuan sebagai  
pencerah hati, baik di lingkungan  
sekolah maupun keluarga.

"Perempuan adalah tiang perad-  
aban. Dari tutur katanya mengalir  
nilai, dari tangannya terukir arah  
masa depan," ungkap Suhartatik. Ia  
berharap kepada seluruh pendidik,

khususnya guru Perempuan, untuk  
tidak berhenti berkarya meski disibuk-  
kan dengan aktivitas mengajar di kelas.

Kepala DP3AKB Sidoarjo Heni  
Kristiani menyampaikan apresiasi  
yang setinggi-tingginya kepada para  
penulis anggota KGPS. Menurutnya,  
di era digital ini, perempuan memili-

ki peluang yang sangat besar untuk  
berkontribusi melalui tulisan dan  
karya-karya edukatif.

"Di era digitalisasi ini, semua pihak  
diharapkan bisa berperan aktif dalam  
pemberdayaan perempuan. Harapan-  
nya, perempuan Sidoarjo terus berk-  
arya dan berdaya untuk membangun  
Sidoarjo yang lebih baik," harapnya.

Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, mem-  
berikan apresiasi setinggi-tingginya atas  
produktivitas 35 anggota KGPS yang  
secara konsisten melahirkan karya.  
Menurutnya, keberhasilan meluncurkan  
buku hingga edisi ke-15 merupakan  
capaian luar biasa yang patut dicontoh.

"Hari ini kita menjadi saksi atas  
sebuah pencapaian sastra yang mem-  
banggakan, yakni peluncuran antolo-  
gi puisi 'Perempuan Pencerah Hati'  
karya para guru penulis di Kabupaten  
Sidoarjo," ujar Mustain.

Mustain, menambahkan, bahwa  
menulis adalah bentuk perjuangan.  
Ketika para guru yang sehari-hari men-  
cerdaskan bangsa menuangkan pikiran  
dalam bentuk puisi, itu bukti semangat  
Kartini benar-benar hidup. (sta/ns)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

**LENERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

PARLEMEN

## Komisi A DPRD Sidoarjo Sinkronisasi Regulasi Pilkades untuk Jaga Kualitas Demokrasi

07 MAY 2026



Upaya DPRD Sidoarjo memastikan regulasi dan tata kelola Pilkades berjalan tertib, demokratis, dan bebas polemik hukum.

SIDOARJO (Lentera) – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan digelar di 80 desa pada 24 Mei 2026, DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Komisi A bergerak cepat merapikan regulasi. Langkah ini diambil guna memastikan proses demokrasi berjalan tertib, demokratis, dan bebas dari polemik hukum.

Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin di Gedung Dewan, Kamis (7/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Probo Agus Sunarno serta jajaran pengurus Forum Komunikasi BPD (Forkom BPD) se-Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama diskusi, adalah penyesuaian tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah status hukum perangkat desa yang mencalonkan diri. Berbeda dengan aturan lama yang cukup mengambil cuti, berdasarkan regulasi baru, mereka diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan.

"Kami tegaskan dengan sangat jelas, demi menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan, perangkat desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa (Cagades) sebaiknya mengundurkan diri. Ini sejalan dengan semangat dan substansi PP Nomor 16 Tahun 2026," ujar Rizza.

Meskipun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan teknis masih dalam proses penyusunan, Rizza menegaskan agar asas hierarki peraturan tetap dijunjung tinggi. Ia meminta, Dinas PMD segera melakukan sosialisasi masif agar tidak terjadi kerancuan pemahaman di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Forkom BPD juga menyampaikan aspirasi terkait hak tunjangan purna tugas bagi anggota BPD yang kini diatur secara eksplisit dalam PP baru tersebut. Menanggapi hal itu, Rizza menjamin Komisi A akan mengawal penuh agar hak tersebut dapat diakomodasi dalam kebijakan daerah.

"Kalau memang hak itu sudah tertulis jelas dalam undang-undang, maka harus dipenuhi. Kami pastikan hak teman-teman BPD tidak terabaikan," tegasnya.

Sementara itu, terkait fenomena baliho kampanye yang menyertakan gambar atau nama anggota DPRD, Rizza mengaku telah melakukan klarifikasi internal. Ia memastikan, mayoritas anggota dewan tidak mengetahui dan tidak memberikan izin atas penggunaan identitas tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas PMD, Probo Agus Sunarno menyatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan Kementerian Dalam Negeri, begitu regulasi pusat terbit Pemkab akan segera menyesuaikan Perbup yang berlaku.

Hingga akhir pertemuan, Komisi A DPRD Sidoarjo berkomitmen penuh untuk melakukan pengawasan ketat di setiap tahapan agar Pilkades Serentak 2026 berjalan lancar, jujur, adil, dan aman.

Reporter: Teguh/Editor: Ais

Tags: **Parlemen**

Share:



PEMERINTAHAN

## Banyak Laporan, DPRD Sidoarjo Awasi Ketat Tahapan Pilkades 2026

09 MAY 2026



Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasik.

SIDOARJO (Lentera) - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasik, mengakui pihaknya telah menerima banyak laporan dan aduan resmi maupun aspirasi dari masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2026.

"Banyak laporan yang masuk ke kami, baik yang disampaikan langsung, tertulis, maupun melalui perwakilan masyarakat dan calon. Isunya beragam, namun intinya menyangkut netralitas, keadilan, dan transparansi kinerja panitia. Ini menjadi perhatian serius DPRD, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap demokrasi di desa," ujar Abdillah Nasik saat dikonfirmasi awak media di Sidoarjo, Sabtu (9/5/2026).

Berbagai keluhan tersebut mayoritas menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur, hingga praktik keberpihakan yang diduga dilakukan panitia pemilihan di tingkat desa. Hal ini dinilai sangat mencederai prinsip dasar demokrasi serta meresahkan masyarakat yang sedang menanti proses pemilihan pemimpin desa.

Menurut Abdillah, aduan yang masuk sangat beragam rinciannya. Tak sedikit juga laporan yang menyebutkan adanya indikasi keberpihakan panitia kepada salah satu calon tertentu, serta dugaan manipulasi tahapan yang dianggap tidak transparan dan merugikan pihak lain.

Ia menegaskan, sesuai dengan fungsi utama lembaga legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan, DPRD Sidoarjo akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima secara serius, mendalam, dan objektif.

Pihaknya telah membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan, sekaligus berkomitmen berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta instansi terkait lainnya.

Hal ini dilakukan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan sejak dini dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka atau gesekan sosial yang merugikan kerukunan warga.

Menurut Abdillah, penyelenggaraan Pilkades haruslah menjadi sarana demokrasi yang bersih, bermartabat, dan menjunjung tinggi asas jujur, adil, transparan, serta akuntabel. Peran panitia di tingkat desa menjadi kunci utama keberhasilan pemilihan.

Jika panitia tidak bekerja secara mandiri, independen, dan netral, maka potensi terjadinya sengketa pemilihan, gugatan hukum, hingga konflik sosial di tengah masyarakat akan semakin besar dan sulit diredam.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY



Berbagai kecurangan tersebut mayoritas menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur, ningga praktik keberpihakan yang diduga dilakukan panitia pemilihan di tingkat desa. Hal ini dinilai sangat mencederai prinsip dasar demokrasi serta meresahkan masyarakat yang sedang menanti proses pemilihan pemimpin desa.

Menurut Abdillah, aduan yang masuk sangat beragam rinciannya. Tak sedikit juga laporan yang menyebutkan adanya indikasi keberpihakan panitia kepada salah satu calon tertentu, serta dugaan manipulasi tahapan yang dianggap tidak transparan dan merugikan pihak lain.

Ia menegaskan, sesuai dengan fungsi utama lembaga legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan, DPRD Sidoarjo akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima secara serius, mendalam, dan objektif.

Pihaknya telah membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan, sekaligus berkomitmen berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta instansi terkait lainnya.

Hal ini dilakukan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan sejak dini dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka atau gesekan sosial yang merugikan kerukunan warga.

Menurut Abdillah, penyelenggaraan Pilkades haruslah menjadi sarana demokrasi yang bersih, bermartabat, dan menjunjung tinggi asas jujur, adil, transparan, serta akuntabel. Peran panitia di tingkat desa menjadi kunci utama keberhasilan pemilihan.

Jika panitia tidak bekerja secara mandiri, independen, dan netral, maka potensi terjadinya sengketa pemilihan, gugatan hukum, hingga konflik sosial di tengah masyarakat akan semakin besar dan sulit diredam.

"Kami mendorong seluruh panitia Pilkades di 80 desa se-Kabupaten Sidoarjo untuk bekerja secara profesional, berpegang teguh pada aturan dan perundang-undangan, serta benar-benar tidak memihak kepada siapa pun. Panitia harus menjadi penengah yang adil. Apabila terbukti ada pelanggaran, penyimpangan, atau keberpihakan, maka harus segera ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku demi menjaga marwah demokrasi," tegasnya.

Sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan Pilkades 2026 memang mulai mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan tajam publik.

Bahkan, jauh sebelum tahapan ini berjalan, DPRD Sidoarjo telah menggelar Forum Dengar Pendapat (Hearing) secara khusus untuk membahas berbagai polemik, mulai dari perbedaan pemahaman regulasi baru, teknis pelaksanaan, hingga potensi pelanggaran administrasi yang mungkin dilakukan panitia desa.

Selain persoalan teknis dan kinerja panitia, DPRD juga menyoroti secara ketat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026. Salah satu poin krusial yang terus diawasi adalah aturan mengenai pencalonan kepala desa dari kalangan perangkat desa aktif.

Sesuai aturan baru, perangkat desa yang maju menjadi calon wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya guna mencegah konflik kepentingan dan menjaga netralitas. Hal ini menjadi fokus pengawasan agar tidak terjadi tafsir ganda di lapangan.

Abdillah Nasik menambahkan, hingga tahapan akhir nanti, DPRD akan terus menjaga saluran pengaduan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat. Tim pemantau dari Komisi A DPRD juga akan turun langsung ke sejumlah desa untuk memantau situasi dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin Pilkades Serentak 2026 ini benar-benar berjalan kondusif, aman, damai, demokratis, dan melahirkan pemimpin desa yang berkualitas. Pemimpin yang benar-benar dipilih secara adil, murni, jujur, dan menjadi kepercayaan hati masyarakat luas. Demokrasi di desa harus berjalan bersih agar hasilnya bisa membawa kemajuan bagi desa tersebut," pungkas Abdillah.

Reporter: Teguh/Editor: Santi

Tags: Pemerintahan

Share:



# Aduan Warga Warnai Hari Fraksi PKB Perdana

Siska Prestiwati  
8 May 2026 16:59

TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK 0 54

3 MINUTES READING



### Related posts

Betonisasi Ruas Jalan Kalanganyar-Segorotambak Mulai

**Sidoarjo (Aksaraindonesia.id)** – Pelaksanaan perdana Hari Fraksi PKB di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Jumat (8/5/2026), disambut antusias puluhan warga. Sejak pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, masyarakat datang silih berganti ke kantor yang berlokasi di Jl. Airlangga No. 5-6 Kapasan, Sidokare, Sidoarjo, untuk menyampaikan beragam keluhan dan aspirasi secara langsung kepada para legislator.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



HOME TERUPDATE NASIONAL HUKRIM PEMERINTAHAN POLITIK PENDIDIKAN KESEHATAN OLAHRAGA LAINNYA

Segorotambak Mulai  
Dikerjakan

AJS Gandeng Wakil Ketua  
DPRD Perkuat Benteng  
Informasi Jelang Pilkadaes  
2026

Optimis Selesai Tepat  
Waktu, DLHK Sarankan  
Tambah Tenaga Kerja  
untuk Revitalisasi Alun-  
alun

Kasrem 084/BJ Hadiri  
Safari Ramadan Kapolri di  
Polda Jatim

Aksi Spontan Emak-emak  
Redam Eksekusi  
Pembongkaran Tembak  
Mutiarra Regency

Unitomo Surabaya  
Deklarasikan Kawasan  
Tanpa Rokok di Kampus

Ketua DPC PKB Sidoarjo, H Abdillah Nasih, menyebut salah satu aduan yang cukup menonjol datang dari tenaga honorer pendidikan. Mereka mempertanyakan kebijakan dalam SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang masih memberi ruang bagi guru non-ASN mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 sebelum kebijakan penghentian total berlaku mulai 1 Januari 2027. Menurut Abdillah, aspirasi ini akan menjadi perhatian khusus karena menyangkut keberlanjutan layanan pendidikan.



Read Also

**Jatim Pacu Program MBG: 3.269  
SPPG Aktif, Emil Sambut  
Kehadiran Menko Zulhas**

19 FEB 2026



Di luar isu pendidikan, warga juga menyoroti persoalan infrastruktur. Salah satunya soal truk-truk yang kerap *ngetem* menunggu operasional timbangan jalan. Kondisi ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan memicu kemacetan. Keluhan lain yang muncul adalah aktivitas penyembelihan ayam di sekitar Pasar Taman Sepanjang yang menimbulkan bau tidak sedap dan dianggap mengganggu kenyamanan warga.

H Abdillah menyampaikan bahwa seluruh aduan akan diteruskan kepada komisi terkait di DPRD. Dalam kegiatan ini, anggota dari Komisi A, B, C, dan D ikut terlibat untuk menerima dan mengelompokkan aduan sesuai bidangnya. "Setelah ini kami akan memanggil OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil Hari Fraksi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Khudlari, menegaskan bahwa Hari Fraksi bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sarana nyata untuk memastikan suara masyarakat tidak terputus di tengah proses pemerintahan. Ia menyebut banyak warga yang selama ini bingung harus melapor ke mana, sehingga kehadiran Hari Fraksi menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara warga dan para wakilnya di DPRD. "Kami ingin masyarakat merasa bahwa gedung dewan ini memang rumah aspirasi mereka," ujarnya.

Dhamroni juga menambahkan bahwa setiap laporan yang masuk tidak akan berhenti di forum. Menurutnya, Fraksi PKB sudah menyiapkan mekanisme tindak lanjut yang melibatkan komisi-komisi terkait hingga koordinasi langsung dengan OPD. "Kami ingin memastikan setiap keluhan punya arah penyelesaian. Tidak ada aspirasi yang kami biarkan menguap begitu saja," tegasnya.

Pada hari pertama, program ini digelar dalam dua sesi. Sesi pertama dihadiri oleh H Usman Mkes, H Rizza Ali Faizin, Hj Ainun Jariya, H Pujiono, H Elok Suciwati, Muhammad Rojik, dan Atok Ashari. Sementara sesi kedua menghadirkan H Abdillah Nasih, H Dhamroni Khudlari, H Sayfuddin Affandi, J Sullamul Hadi Nurmawan, J Sutadji, H Abud Asyirofi, dan H Rafi Wibisono.

Beragam persoalan bermunculan sepanjang forum, mulai dari kekhawatiran penghapusan guru honorer, pemanfaatan gedung sekolah untuk kegiatan masyarakat, masalah infrastruktur jalan, hingga aduan soal limbah dan bau dari rumah potong ayam.

Sejumlah warga yang hadir mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan para wakil rakyat. Mereka berharap aduan yang telah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti. Sementara itu, pihak fraksi menyebut kegiatan seperti ini akan rutin digelar sebagai bentuk komitmen mendekatkan DPRD dengan masyarakat.

PKB MASYARAKAT HARI FRAKSI ADUAN KETUA DPC PKB ABDILLAH NASIH

